

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAMPING DESA DI DESA BERENG BERKAWAT KECAMATAN BEDUAI KABUPATEN SANGGAU

Oleh:

DESSYANA KURNIAWATI NINGSIH^{1*}

NIM: E1013161012

Dedi Kusnadi², Agus Eka²

*Email: dessyana793@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses implementasi kebijakan program pendamping desa di Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan dari kebijakan program pendamping desa di Desa Bereng Berkawat yang belum berjalan dengan optimal dikarenakan faktor-faktor: sering berubahnya peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan program pendamping desa, kurangnya pemahaman pendamping desa dalam menjalankan tugasnya, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan. Permasalahan mengenai proses pelaksanaan kebijakan program pendamping desa di Desa Bereng Berkawat cukup menarik untuk diteliti karena masih rendahnya sumber daya manusia terutama ditingkat pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa itu sendiri membuktikan belum efektifnya tujuan dari program pendamping desa yaitu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan khususnya di tingkat paling bawah. Proses pelaksanaan kebijakan pendamping desa di Desa Bereng Berkawat mencakup 3 (tiga) hal yaitu: pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi dalam proses Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa di Desa Bereng Berkawat. Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan ialah: untuk pengorganisasian dengan sering berubahnya peraturan mengenai pedoman pelaksanaan program pendamping seharusnya pendamping desa harus lebih tanggap dalam menyikapinya. Untuk interpretasi pemahaman secara mendalam juga dapat diperhatikan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi panutan dalam melaksanakan suatu program. Dan untuk aplikasi seharusnya dalam hal ini pihak Kecamatan dapat lebih sering memantau apakah program pendamping desa sudah berjalan dengan semestinya.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Program Pendamping Desa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAMPING DESA DI DESA BERENG BERKAWAT KECAMATAN BEDUAI KABUPATEN SANGGAU

Oleh:

DESSYANA KURNIAWATI NINGSIH^{1*}

NIM: E1013161012

Dedi Kusnadi², Agus Eka²

*Email: dessyana793@student.untan.ac.id

3. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

The writing of this research aims to describe and analyze the policy implementation process of village companion program in Bereng Berkawat Village, Beduai Sub-District, Sanggau Regency. This research uses descriptive research by using qualitative approach. Research results indicate that the policy implementation process of village companion program in Bereng Berkawat Village has not been running optimally due to the factors consisting of: frequent changes in regulations that guide the implementation of village companion program, the lack of understanding from village companions in performing their duties, and the lack of supervision by the Sub-District. The problem regarding the policy implementation process of village companion program in Bereng Berkawat Village is quite interesting to study due to the low level of human resources especially at the village government level in managing the village government it self which proves the ineffectiveness of the objectives in village companion program to improve the quality of human resources so that they are better in managing government especially at the lowest level. The policy implementation process of village companion program in Bereng Berkawat Village includes 3 (three) things, namely: organizing, interpreting, and applying in the policy implementation process of village companion program in Bereng Berkawat Village. It is recommended by the writer that: for organizing, village companion should be more responsive to frequent changes in the regulation regarding the guidelines for the implementation of the companion program. For interpretation, in-depth understanding should also be considered in accordance with the guidelines that have become role models in implementing a program. Finally, for the application, the sub-district should monitor more often whether the village companion program is running properly.

Keywords: Implementation, Policy Village Companion Program

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pendamping desa bertujuan untuk mengawal pembangunan Indonesia dari pinggiran. Selain membangun dari pinggiran program pendamping desa ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan khususnya ditingkat palig bawah.

Tujuan dari kebijakan program pendamping desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa terdapat dalam pasal 2, yaitu sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
2. meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif;
3. meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya Desa bagi kesejahteraan dan keadilan; dan
4. meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama Desa dan Kawasan Perdesaan.

Dalam pelaksanaanya kebijakan pendamping desa di Desa Bereng Berkawat masih belum terlaksanakan

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun kendala-kendala yang membuat kinerja pendamping desa belum berjalan secara optimal dalam menjalankan tugas nya yang pertama ialah sering berubahnya peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pendamping desa.

Contohnya saja saat penulis melakukan penelitian awal sekitar bulan Juni 2019 peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan program pendamping desa ialah Peraturan Menteri Desa (PermenDes) No 03 Tahun 2015 Tentang pendamping Desa. Namun pada bulan Februari 2020 saat penulis melakukan penelitian lagi, peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan program pendamping desa sudah berubah menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. Tentunya dengan sering nya terjadi perubahan dalam peraturan tentang program pendamping desa, akan sangat mempengaruhi program pendamping desa itu sudah berjalan secara optimal atau belum.

Masalah selanjutnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pendamping desa ialah kurangnya pemahaman pendamping desa dalam menjalankan program pendamping desa.

Dapat kita simpulkan bahwa dengan terlalu sering nya peraturan mengenai pendamping desa yang berubah-ubah, mengakibatkan juga kurangnya pemahaman pendamping desa dalam menjalankan program pendamping desa secara optimal. Karena saat mereka belum menguasai sebuah peraturan, tetapi peraturan itu sudah diganti lagi oleh peraturan yang baru.

Kendala selanjutnya yang menjadi masalah dalam pelaksanaan program pendamping desa adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan. pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap pelaksanaan kebijakan program pendamping desa sangatlah jarang, serta pihak Kecamatan terlalu percaya sepenuhnya terhadap pendamping desa. Mungkin jika pihak Kecamatan lebih sering melakukan pengawasan, program pendamping desa di Desa Bereng Berkawat akan jauh lebih baik lagi dibandingkan saat ini.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pendamping desa di Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. sering berubahnya peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan program pendamping desa
2. kurangnya pemahaman pendamping desa dalam menjalankan tugasnya
3. kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada proses Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa di Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini maka di buatlah sebuah rumusan permasalahan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu: "Bagaimana proses implementasi kebijakan program pendamping desa di Desa Bereng Berkawat ?"

5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan program pendamping desa di Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan, pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis. Selanjutnya, dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan implementasi kebijakan program pendamping desa. Selain itu, sebagai bahan kajian bagi pihak terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan. Demikian juga diharapkan dapat memberikan

rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan program pendamping desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan Publik

Anderson (dalam Subarsono, 2011:2) mengatakan jika kebijakan adalah suatu yang ditetapkan oleh badan-badan aparat pemerintah. Badan dan aparat pemerintah adalah mereka yang memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan terkait kehidupan orang banyak. Kebijakan public tidak tercipta secara instan, tetapi melalui proses atau tahapan-tahapan yang cukup panjang, yang mana dalam pelaksanaannya meliputi berbagai tahapan mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Nawawi, 2009:16). Hal ini juga disampaikan oleh David Easton (dalam Widodo, 2008:13) bahwa kebijakan merupakan komponen dari input, proses dan output.

Jenis Kebijakan Publik

Secara tradisional, pakar ilmu politik mengategorikan kebijakan public kedalam kategori: (1) Kebijakan substantive (misalnya: kebijakan perburuhan, kesejahteraan social, hak-hak sipil,

masalah luar negeri dan sebagainya); dan (2) Kelembagaan (misalnya: kebijakan legislative, kebijakan judikatif, kebijakan departemen); (3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa Reformasi, kebijakan masa Orde baru, dan kebijakan masa Orde Lama).

Makna Kebijakan Publik

Studi kebijakan public memiliki tiga manfaat penting, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisis, dan untuk tujuan politik (Dye 1981, Anderson, 1979).

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dalam konteks ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan public sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*), sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya (*independent variable*). Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat memengaruhi isi dari sebuah kebijakan public. Misalnya, studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dikeluarkannya undang-undang anti terorisme di Indonesia. Sebaliknya, studi kebijakan public dapat menempatkan kebijakan public sebagai *independent variable*, sehingga berusaha mengidentifikasi apa dampak dari suatu kebijakan publik. Sebagai contoh, studi untuk menganalisis apa dampak dari

kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah public.

Dengan mempelajari kebijakan public para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan public. Sehingga ke depan akan lahir kebijakan public lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan.

3. Berguna untuk tujuan politik

Suatu kebijakan public yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Kebijakan public tersebut dapat meyakinkan kepada lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju. Kebijakan public seperti itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik.

Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi

kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Implementasi kebijakan Publik

Menurut Meter dan Horn dalam Wahab (2008:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Lalu implementasi kebijakan menurut Dunn (2003:132) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Proses kebijakan publik menurut Dunn dalam Pasolong (2012:41) antara lain:

- Penetapan agenda kebijakan,
- Adopsi kebijakan,
- Implementasi kebijakan, dan
- Evaluasi kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Menurut Krik Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan

kualitatif melibatkan pengukuran tingkatan ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamatan harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu.

Langkah-langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian, langkah-langkah penelitian memuat tentang tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam melakukan proses penelitian. Langkah-langkah yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

1. Studi pendahuluan

Tahap awal dilakukan dengan studi pendahuluan ke lapangan studi pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penelitian, informan yang dipilih, dan menemukan masalah yang sedang terjadi, studi pendahuluan ini peneliti lakukan di Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau dilanjutkan dengan outline penelitian.

2. Membuat Usulan Penelitian

Setelah melakukan studi pendahuluan peneliti melanjutkannya dengan membuat usulan penelitian, usulan penelitian merupakan pedoman yang berisi rencana dalam melakukan langkah dan tahapan yang harus dilalui peneliti. Dalam pembuatan usulan penelitian ini harus didahului studi pendahuluan yang

berdasarkan pada masalah yang diangkat. Setelah studi pendahuluan dilaksanakan maka pedoman penelitian harus dibuat dalam bentuk usulan peneliti dengan mengantisipasi berbagai sumber yang mendukung dan menghambat penelitian.

3. Melakukan Penelitian

Melakukan penelitian dilakukan untuk mengambil data-data yang diperlukan baik data sekunder maupun primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui orang lain atau sumber-sumber data yang ada seperti dari data instansi pemerintah dan pihak-pihak lain atau informan yang memberikan informasi yang dapat dipercaya.

4. Membuat Laporan Penelitian (Skripsi)

Membuat laporan penelitian berupa skripsi berdasarkan pada data-data yang di peroleh saat melakukan penelitian, hasil penelitian tersebut dibuat dalam bentuk tulisan (Skripsi).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai kabupaten Sanggau. Desa Bereng Berkawat dipilih sebagai lokasi penelitian Karena peneliti ingin mengetahui proses

Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa di Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau.

Kegiatan penelitian dimulai dari penulisan outline, penyusunan proposal penelitian dan konsultasi, penelitian lapangan, tahap penyeleksi data dan uji keabsahan data, membuat skripsi dan konsultasi skripsi.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah proses Implementasi Kebijakan Pendamping Desa di Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau. Objek dalam penelitian ini yaitu data (dokumen atau naskah). Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Dokumen merupakan sumber data dalam bentuk naskah peraturan perundang-undangan, arsip-arsip data statistic dan sebagainya. Berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka informasi yang perlukan antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama dibentuknya kebijakan program pendamping desa.

2. Laporan rutin (tahunan) atau laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pendamping desa berkaitan dengan masalah dalam penelitian.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai hubungan dengan substansi penelitian.

Sumber-sumber data tersebut di atas dapat diperoleh dari informan-informan dimaksud di sini adalah orang-orang yang menurut penulis yang dipertimbangkan dapat memberikan data, informasi, dan memahami permasalahan yang diteliti.

Subjek penelitian adalah informan atau narasumber. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian ini adalah dilakukan dengan secara purposive sampling. Dalam Sugiyono (2010:53) purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut paling tau tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.

Adapun subjek penelitian yang diambil penulis adalah sebagai berikut:

1. Pj. Kepala desa
2. Pendamping desa Pemberdayaan
3. Pendamping desa Teknik Infrastruktur

Dalam menentukan subjek penelitian ini peneliti menggunakan purposive karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian kualitatif harus bisa menentukan subjek penelitian yang betul-betul kaya informasi juga terlibat dalam peristiwa yang diteliti dan hal tersebut sesuai dengan maksud dari purposive.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, hal yang terpenting adalah pengumpulan data. Sugiono (2010:63) menjelaskan dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada “natural setting” (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi berperan serta (participant observation) wawancara mendalam dan dokumentasi.

Adapun cara yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dilapangan adalah:

1. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dan komunikasi secara langsung dengan informan yang mengetahui permasalahan tentang implementasi kebijakan program pendamping desa di Desa Bereng Berkawat.
2. Observasi, Observasi merupakan pengamatan setiap kegiatan untuk melaksanakan pengukuran.

3. Dokumentasi, yaitu mencari mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen. Surat-surat serta buku literatur yang berhubungan dengan peraturan daerah, peraturan desa, surat-surat keputusan atau surat edaran yang dianggap sesuai dengan objek penelitian.

Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Dari penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini instrument pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan alat bantu seperti:

1. Pedoman wawancara, yaitu serangkain catatan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan aspek-aspek penelitian.
2. Alat yang digunakan dalam teknik observasi ini antara lain: lembar ceklis, buku catatan, kamera photo. Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukan untuk melihat proses kerja.
3. Alat pencatat atau notebook. Yaitu alat pengumpul data yang digunakan yaitu

berupa file atau fotokopi serta catatan ringkasan yang digunakan penulis untuk mencatat hasil wawancara.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan suatu kredibilitas dengan menggunakan pengecekan dengan berbagai cara, waktu, serta sumber (dalam Sugiyono 2011:273). Triangulasi terbagi menjadi tiga cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengecekan data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak terkait maupun dokumentasi yang dapat diperoleh peneliti selama melakukan proses penelitian. Peneliti akan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan tersebut yang mana memungkinkan terdapat perbedaan pendapat maupun sudut pandang antara pihak-pihak yang diwawancarai untuk kemudian diambil kesamaan-kesamaan agar tidak berubah sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola pola pengarahan dan sebab akibat.

D. HASIL PENELITIAN

Pengorganisasian

Menurut Charles O Jones (1996:311) organisasi merupakan perhatian paling utama karena penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan. Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang. Setiap organisasi harus memiliki struktur tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Untuk memahami pengorganisasian dalam implementasi kebijakan program pendamping desa menurut peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigran Nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan

masyarakat desa, selanjutnya akan dibahas mengenai pelaksana kebijakan.

Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Interpretasi

Sebuah kebijakan tidak akan mencapai tujuan apabila terdapat perbedaan interpretasi atau pemahaman antar implementor kebijakan maupun sasaran kebijakan. Pemahaman yang baik merupakan salah satu faktor penentu kebijakan berhasil atau tidak dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu sangat diperlukan isi dan tujuan kebijakan program pendamping desa.

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

Aplikasi

Tahap aplikasi (dalam Widodo:2010:94) merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan meliputi penyediaan barang dan jasa serta penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada programmed implementation (ketentuan dan prosedur) dan Adapted Implementation adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan yang bersifat dinamis, serta sanksi atau penindakan dalam sebuah permasalahan yang terjadi pada keluarga menjadi aspek pada variabel aplikasi, dibawah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, yang mana dari segi pelaksanaan penerapan program pendamping desa.

Penerapan adalah perbuatan menerapkan atau suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

E. PENUTUP

1.Kesimpulan

Berdasarkan teori Charles O Jhones, Implementasi kebijakan program pendamping desa di Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau dapat di simpulkan bahwa:

Pengorganisasian

Sering berubahnya peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan program pendamping desa masih yang mengakibatkan program pendamping desa belum berjalan optimal.

Interpretasi

Masih kurangnya pemahaman pendamping desa dalam menjalankan tugasnya, kurangnya pemahaman pendamping desa disebabkan karena sering berubahnya

peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan program pendamping desa.

Aplikasi

Pelaksanaan program pendamping desa masih kurang optimal dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan.

2.Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan penelitian ini yang berjudul “implementasi kebijakan program pendamping desa di desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau”.

Pengorganisasian

Dengan sering berubahnya Peraturan mengenai pedoman pelaksanaan program pendamping seharusnya pendamping desa harus lebih tanggap dalam menyikapinya. Sehingga, walaupun peraturannya sering berubah, tidak menjadi penghalang dalam menjalankan tugasnya.

Interpretasi

Pemahaman secara mendalam juga dapat diperhatikan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi panutan dalam melaksanakan suatu program agar dalam proses Implementasi saat dilaksanakan secara arahan yang jelas dan di koordinir dengan baik.

Penerapan atau Aplikasi

Dengan adanya jarak yang cukup jauh tidak menjadi penghalang lagi dalam berkomunikasi, seharusnya dalam hal ini pihak Kecamatan dapat lebih sering memantau apakah program pendamping desa sudah berjalan dengan semestinya.

REFERENSI

Buku-buku

Agustiono, Leo.(2008). *Dasar-dasar kebijakan public*. Alfabeta,CV. Bandung.

Anderson, James E. (1979). *Publik Policy Making, Holt, Rinehart and Winston*. New York, Chapter 1-2 dan 5.

Bungin, burhan. (2001). *Metodelogi Penelitian Sosial, format-format kuantitatif dan kualitatif*. Airlangga University Press. Surabaya.

----- (2003). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

----- (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya Edisi Kedua*. Prenada Media Group. Jakarta.

Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy*,Preitice-Hall. New Jersey, Chapter 1.

Emzir. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo. Jakarta.

Howlet, Michael dan Ramesh M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press Toronto, Chapter 1.

Komarudding. 2018. “Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.” Skripsi. Universitas Lampung.

Maya Melinda. 2018. “Implementasi Peran Pendamping Desa.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Moleong, J Lexy. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

----- (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mulyadi, Mohammad. (2011). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Nadi Pustaka. Yogyakarta.

Nawawi, H Ismail. (2009). *Public Policy. PMN*. Surabaya

Nugroho, D Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.

----- (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

----- (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfbeta. Bandung.

----- (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

----- (2013). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Alfabeta CV. Bandung.

Wahab, S Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Banyumedia Publishing. Malang.

Wnarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Yogi Noviantama. 2017. "Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa." Skripsi. Universitas Lampung.

